

Persengketaan tanah di Sumatera Timur kasus Tanjung Morawa 1952-1953

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20310430&lokasi=lokal>

Abstrak

Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, berupa buku-buku, surat kabar-surat kabar, artikel-artikel dan sumber-sumber yang tidak diterbitkan seperti, arsip-arsip. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh satu peristiwa yang berakibat pada politik.

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa persengketaan tanah yang terjadi di Sumatera Timur, sebenarnya sudah ada sejak daerah tersebut diduduki oleh pemerintah kolonial Belanda yang disertai oleh pemerintah kolonial Belanda yang disertai oleh kedatangan pengusaha-pengusaha perkebunan asing. Selanjutnya sengketa tanah memuncak dengan apa yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Morawa, yang terjadi pada tanggal 16 Maret 1953.

peristiwa ini terjadi karena adanya bentrokan senjata antara Brigade Mobil Polisi dengan penduduk yang dianggap sebagai penduduk liar, yang mana menduduki tanah-tanah perkebunan secara tidak sah.

Bentrokan itu terjadi karena adanya hasutan dari kader-kader Partai Komunis Indonesia agar penduduk menolak untuk pindah dari tanah-tanah garapannya. Dalam bentrokan tersebut 5 orang petani terbunuh.

Peristiwa yang terjadi ini, kemudian mendapat sorotan tajam dan emosional dari parlemen. Mosi tidak percaya dilancarkan oleh Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia (SAKTI). Menghadapi mosi itu kedudukan kabiner menjadi goyah dan akibatnya pada tanggal 2 Juni 1953 wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden sebelum parlemen sempat membicarakan usul mosi Sidik.